

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13 Tanggal 04 Oktober 2016). Sedangkan Tugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 61 Tanggal 02 Desember 2016) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan

kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian pada Triwulan I dalam satu tahun anggaran kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja, bidang koperasi Usaha Kecil dan bidang perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- e. Evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:

1. Kepala Dinas

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdiri dari :

- **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- **Subbagian Perencanaan** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian.
- **Subbagian Keuangan** mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.

3. Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan kualitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari:

- **Seksi Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyaluran dan penempatan tenaga kerja, pelayanan perizinan dan pengawasan lembaga pelatihan kerja serta pembinaan produktivitas kerja.
- **Seksi Penempatan Tenaga Kerja** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan penyaluran penempatan tenaga kerja dan pencari kerja serta penggunaan tenaga kerja asing, serta menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan pencari kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pengembangan masyarakat dan sumberdaya manusia.
- **Seksi Hubungan Industrial** mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pembinaan kelembagaan hubungan industrial, pengaturan syarat-syarat kerja, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pengendalian ketenagakerjaan.

4. Bidang Koperasi Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, pelayanan sosial anak dan lanjut usia, sumberdaya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM). Bidang Koperasi usaha kecil terdiri dari :

- **Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan sumberdaya manusia koperasi usaha kecil dan usaha mikro (UKM).

- **Seksi Usaha dan Pembiayaan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan usaha dan pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM).
 - **Seksi Promosi dan Pengawasan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan promosi dan pengawasan terhadap koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM).
- 5. Bidang Perindustrian** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian industry logam, mesin, sandang, pangan, kerajinan dan aneka. Bidang Perindustrian terdiri dari :
- **Seksi Logam dan Mesin** mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengaturan dan pelayanan pengembangan alih teknologi, bimbingan teknis, fasilitasi, advokasi dan peningkatan sumberdaya manusia dalam perekayasaan dan pemanfaatan mesin dan produk logam.
 - **Seksi Sandang dan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelayanan, bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dalam pengolahan dan diversifikasi produk sandang dan pangan.
 - **Seksi Kerajinan dan Aneka** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pelayanan, bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan sumber daya peningkatan dalam pengolahan dan pengembangan produk kerajinan dan aneka.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Pelayanan kepada masyarakat bidang tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan perindustrian perlu di tingkatkan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka.

3. Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja.
4. Rendahnya Tingkat Penempatan Tenaga Kerja.
5. Rendahnya partisipasi angkatan kerja.
6. Rendahnya Perlindungan terhadap Ketenagakerjaan.
7. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas koperasi yang berdaya saing.
8. Rendahnya Kualitas SDM Koperasi.
9. Rendahnya Kualitas SDM Usaha Kecil
10. Rendahnya Potensi industri.
11. Rendahnya kompetensi SDM industri kecil
12. Rendahnya area pemasaran produk Industri Kecil
13. Rendahnya unit usaha industri kecil menengah yang memiliki sertifikasi mutu produk

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Di dalam suatu perencanaan strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1) Visi

**“TERWUJUDNYA WIRUSAHA YANG MANDIRI SEKTOR TENAGA KERJA,
KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN”**

2) Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
- 2) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka.
- 3) Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja.
- 4) Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja.
- 5) Meningkatkan partisipasi tenaga kerja.
- 6) Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.
- 8) Meningkatkan SDM koperasi yang berkualitas
- 9) Meningkatkan SDM usaha kecil yang berkualitas
- 10) Meningkatkan pembinaan 5000 wirausaha baru
- 11) Meningkatkan pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil
- 12) Meningkatkan promosi produk industri kecil
- 13) Meningkatkan unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi

3) Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan pembangunan dibidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian yaitu :

- 1) Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
- 2) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka.
- 3) Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja.
- 4) Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja.
- 5) Meningkatkan partisipasi tenaga kerja.
- 6) Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.
- 8) Meningkatkan SDM koperasi yang berkualitas
- 9) Meningkatkan SDM usaha kecil yang berkualitas
- 10) Meningkatkan pembinaan 5000 wirausaha baru
- 11) Meningkatkan pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil
- 12) Meningkatkan promosi produk industri kecil
- 13) Meningkatkan unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi

b. Sasaran

Adapun **Sasaran** dari tujuan yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian menetapkan 13 (tiga belas) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka.
- 3) Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja.
- 4) Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja.
- 5) Meningkatnya partisipasi tenaga kerja.
- 6) Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
- 7) Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.
- 8) Meningkatnya SDM koperasi yang berkualitas
- 9) Meningkatnya SDM usaha kecil yang berkualitas
- 10)Meningkatnya pembinaan 5000 wirausaha baru
- 11) Meningkatnya pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil
- 12) Meningkatnya promosi produk industri kecil
- 13) Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi

Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hubungan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
			Persentase keluhan pengaduan layanan yang di tindaklanjuti
			Indikator nilai hasil evaluasi AKIP
			Persentase temuan BPK/Inspektorat yang di tindaklanjuti

2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentasi Tingkat Pengangguran Terbuka
3	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentasi Tenaga Kerja yang Kompeten
			Jumlah Calon Wirausaha Baru
4	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan
5	Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang masuk
			Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)
			Persentase Pekerja/Buruh Yang terdaftar jamsostek
			Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan
			Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan
			Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan pelaporan Ketenagakerjaan
6	Meningkatkan partisipasi tenaga kerja	Meningkatnya partisipasi tenaga kerja	persentase tingkat partisipasi angkatan kerja
		Jumlah lowongan pekerjaan baru	Jumlah lowongan pekerjaan baru
7	Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	- Persentase Koperasi Aktif
			- Persentase koperasi sehat
8	Meningkatkan SDM koperasi yang berkualitas	Meningkatnya SDM koperasi yang berkualitas	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
9	Meningkatkan SDM Usaha Kecil yang berkualitas	Meningkatnya SDM Usaha Kecil yang berkualitas	Persentase SDM Usaha Kecil yang berkualitas
10	Meningkatkan pembinaan 5.000 wirausaha baru UMKM	Meningkatnya pembinaan 5.000 wirausaha baru UMKM	Jumlah wirausaha baru UMKM
	Meningkatkan pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil	Meningkatnya pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil	persentase SDM dan / atau Calon SDM industri yang mendapatkan pembinaan
	Meningkatkan promosi produk Industri Kecil	Meningkatnya promosi produk Industri Kecil	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang produknya dipromosikan
	Meningkatkan unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan sertifikasi mutu

4) Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. strategi Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kab. HSS dalam mengaktualisasikan pembangunan Bidang Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan dan akuntabilitas kinerja
2. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengangguran dan tenaga kerja pemula
3. Melaksanakan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja dan penyediaan fasilitas pelayanan ketenagakerjaan yang memadai.
4. Melaksanakan pelayanan administrasi kerja, penyebaran informasi pasar kerja dan bursa kerja.

5. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendataan terhadap jumlah penduduk angkatan kerja dan usia kerja.
6. Melaksanakan pembinaan kelembagaan hubungan industrial dan memfasilitasi kerjasama antar instansi atau perusahaan swasta
7. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan serta sumber daya manusia.
8. Melaksanakan operasional pembinaan dan evaluasi kelayakan koperasi.
9. Melaksanakan pembinaan melalui bimbingan dan pelatihan usaha kecil
10. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha baru
11. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam perekayasaan industry kecil dan menengah
12. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya
13. Melaksanakan peningkatan pelayanan mutu produk industry kecil dan menengah

b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kab. HSS adalah :

1. Melaksanakan pelayanan dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
2. Memberikan pelatihan keterampilan tenaga kerja pemula dan membuka peluang kerja berbasis padat karya.
3. Pemberian keterampilan bagi pencari kerja usia produktif, Penyediaan fasilitas pelayanan ketenagakerjaan yang memadai, Penyediaan data dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan.
4. Memberikan Fasilitasi melalui mekanisme penempatan angkatan kerja lokal, antar daerah dan antar negara serta Memberikan fasilitasi informasi pasar kerja dan bursa kerja bagi calon tenaga kerja.

5. Melaksanakan pengawasan juga pendataan jumlah penduduk angkatan kerja dan usia kerja serta Memberikan informasi lowongan kerja.
6. Menyelesaikan kasus perselisihan tenaga kerja dan perusahaan, Melaksanakan kerjasama dengan perusahaan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.
7. Memberikan peningkatan kemampuan manajerial terhadap koperasi aktif dan Memberikan pelatihan penguatan kelembagaan melalui system yang akuntabel.
8. Memberikan pelatihan dan diklat perkoperasian, Memberikan rekomendasi kelayakan usaha koperasi.
9. Melaksanakan pelatihan pengembangan usaha kecil.
10. Memberikan pelatihan usaha baru melalui pengembangan usaha.
11. Memberikan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.
12. Memberikan fasilitasi promosi dan pengembangan produk industry kecil dan menengah.
13. Memberikan kemudahan izin usaha indutri kecil dan menengah.

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA WIRUSAHA YANG MANDIRI SEKTOR TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN			
MISI 1: Meningkatkan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat (Penanggungjawab: Sekretariat)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Optimalisasi pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Melaksanakan pelayanan dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
MISI 2 : Tingkat Pengangguran Terbuka. (Penanggungjawab: Bidang Tenaga Kerja)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengangguran dan tenaga kerja pemula	Memberikan pelatihan keterampilan tenaga kerja pemula dan membuka peluang kerja berbasis padat karya
MISI 3 : Meningkatkan kompetensi tenaga kerja. (Penanggungjawab: Bidang Tenaga Kerja)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Melaksanakan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja dan penyediaan fasilitas pelayanan ketenagakerjaan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian keterampilan bagi pencari kerja usia produktif. - Penyediaan fasilitas pelayanan ketenagakerjaan yang memadai. - Penyediaan data dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan
MISI 4 : Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja. (Penanggungjawab: Bidang Tenaga Kerja)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Melaksanakan pelayanan administrasi kerja, penyebaran informasi pasar	- Memberikan Fasilitasi melalui mekanisme penempatan angkatan kerja lokal, antar daerah dan antar

		kerja dan bursa kerja	negara - Memberikan fasilitasi informasi pasar kerja dan bursa kerja bagi calon tenaga kerja
MISI 5 : Meningkatkan partisipasi angkatan kerja. (Penanggungjawab: Bidang Tenaga Kerja)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendataan terhadap jumlah penduduk angkatan kerja dan usia kerja	- Melaksanakan pengawasan dan pendataan jumlah penduduk angkatan kerja dan usia kerja - Memberikan informasi lowongan kerja
MISI 6 : Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja. (Penanggungjawab: Bidang Tenaga Kerja)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja	Melaksanakan pembinaan kelembagaan hubungan industrial dan memfasilitasi kerjasama antar instansi atau perusahaan swasta	- Menyelesaikan kasus perselisihan tenaga kerja dan perusahaan - Melaksanakan kerjasama dengan perusahaan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan
MISI 7 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing. (Penanggungjawab: Bidang Koperasi Usaha Kecil)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan serta sumber daya manusia	- Memberikan peningkatan kemampuan manajerial terhadap koperasi aktif - Memberikan pelatihan penguatan kelembagaan melalui system yang akuntabel
MISI 8 : Meningkatkan SDM koperasi yang berkualitas. (Penanggungjawab: Bidang Koperasi Usaha Kecil)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan SDM koperasi yang berkualitas	Meningkatnya SDM koperasi yang berkualitas	Melaksanakan operasional pembinaan dan evaluasi kelayakan koperasi	- Memberikan pelatihan dan diklat perkoperasian - Memberikan rekomendasi kelayakan usaha koperasi

MISI 9 : Meningkatkan SDM Usaha Kecil yang berkualitas. (Penanggungjawab: Bidang Koperasi Usaha Kecil)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan SDM Usaha Kecil yang berkualitas	Meningkatnya SDM Usaha Kecil yang berkualitas	Melaksanakan pembinaan melalui bimbingan dan pelatihan usaha kecil	Melaksanakan pelatihan pengembangan usaha kecil
MISI 10 : Meningkatkan pembinaan 5.000 wirausaha baru. (Penanggungjawab: Bidang Koperasi Usaha Kecil)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pembinaan 5.000 wirausaha baru	Meningkatnya pembinaan 5.000 wirausaha baru	Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha baru	Memberikan pelatihan usaha baru melalui pengembangan usaha
MISI 11 : Meningkatkan pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil. (Penanggungjawab: Bidang Perindustrian)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
meningkatkan pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil	Meningkatnya pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil	Melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam perekrutan industry kecil dan menengah	Memberikan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
MISI 12: Meningkatkan produk Industri Kecil yang di promosikan. (Penanggungjawab: Bidang Perindustrian)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan produk Industri Kecil yang di promosikan	Meningkatnya produk Industri Kecil yang di promosikan	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya	Memberikan fasilitasi dan promosi dan pengembangan produk industry kecil dan menengah
MISI 13: Meningkatkan unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi. (Penanggungjawab: Bidang Tenaga Kerja)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi	Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi	Melaksanakan peningkatan pelayanan mutu produk industry kecil dan menengah	Memberikan kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah

5) Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6	Penyediaan alat tulis kantor
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11	Penyediaan makanan dan minuman
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja	
1	Pembinaan kompetensi pada pencari kerja pemula
2	Pelatihan keterampilan service sepeda motor
3	Pelatihan keterampilan menjahit
4	Pendayagunaan tenaga kerja berbasis padat karya
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
1	Pembinaan industry kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2	penguatan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
3	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
4	promosi dan pengembangan produk industri kecil dan menengah

5	Pengolahan bahan baku potensial
6	Peningkatan rekayasa industry (DAK)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	
1	Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
3	Penyebarluasan informasi upah minimum provinsi
4	Penyebarluasan informasi Norma kerja
5	Survey kebutuhan hidup layak (KHL)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
1	Pembinaan perkoperasian
2	Pemantapan kinerja koperasi penerima dana program
3	Peningkatan gerakan kualitas kelembagaan koperasi
4	Pembinaan bagi gerakan koperasi dan usaha kecil
5	Peningkatan permodalan dan pembiayaan koperasi dan UKM
6	Pembinaan manajemen administrasi usaha koperasi dan usaha kecil

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3**Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	merupakan target kinerja RPJPD 2005-2025 dan target kinerja RPJMD 2013-2018. TPT adalah suatu nilai persentase perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi jika persentase meningkat kemungkinan faktor yang mempengaruhinya adalah terjadinya peningkatan jumlah Angkatan Kerja sebagai akibat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya angka lulusan sekolah. Kemungkinan juga adanya peningkatan jumlah penduduk sementara yang tidak bekerja, berkeinginan untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sehingga menambah jumlah pengangguran.	Jumlah Penganggur Dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja x 100	Data Perusahaan, Kegiatan dan pencari kerja (AK 1)	Bidang Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Merupakan target RPJMD 2014-2018 serta merupakan target kinerja RPJPD 2005-2025	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dibanding Dengan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar x 100		

3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	Merupakan target RPJMD 2014-2018 serta merupakan target kinerja RPJPD 2005-2025	Jumlah penduduk angkatan kerja dibanding jumlah penduduk usia kerja x 100%	Data Perusahaan, Kegiatan dan pencari kerja (AK 1) serta data penduduk pada dukcapil	
4	meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.	Persentase Koperasi Aktif;	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian	jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah koperasi x 100	Data Koperasi dan UK	Bidang Koperasi Usaha Kecil
		Persentase Koperasi Sehat	Merupakan target RPJMD 2014-2018 serta Berdasarkan koperasi yang melaksanakan aplikasi SAK-ETAP	jumlah koperasi sehat dibagi dengan jumlah koperasi x 100		
5	Meningkatnya pembinaan untuk 5000 usaha kecil produktif	Jumlah wirausaha baru	berdasarkan RPJMD 2013-2018 dan penyelesaian target ini juga berdasarkan kolaborasi beberapa organisasi perangkat daerah	jumlah wirausaha baru		
6	Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	Guna meningkatkan Mutu / Kualitas Produk Industri kecil diperlukan standardisasi mutu produk - produk dan / atau SDM Industri Kecil	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	Data Industri kecil dan menengah	Bidang Perindustrian

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai, maka pada Tahun 2018 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	5	6	7	8
1	meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyediaan jasa surat menyurat	3,900,000
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	65,550,000
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11,500,000
					Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	11,000,000
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11,500,000
					Penyediaan alat tulis kantor	23,550,000
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,660,000
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,579,400

					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	48,208,500
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,800,000
					Penyediaan makanan dan minuman	15,890,000
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	179,100,000
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	45,550,000
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	37,350,000
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang di tindaklanjuti	100	Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55,000,000
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77,220,000
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	B	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.950.000,-
		Persentase temuan BPK/Inspektora t yang di tindaklanjuti	100			
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,15	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pendayagunaan tenaga kerja berbasis padat karya	85.525.000,-
3	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	42,76		Pelatihan keterampilan service sepeda motor	319.625.500
		Jumlah calon wirausaha baru	25		Pelatihan keterampilan menjahit	255.440.000
4	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	38,42		Pembinaan kompetensi pada pencari kerja pemula	49.820.000,-
5	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	65,62			
		Jumlah lowongan pekerjaan baru	3			
6	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	0,20	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaa	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	26.023.000,-

		persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	0,33	n	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	21.736.800,-
		persentase Pekerja/Buruh Yang terdaftar	0,42		Penyebarluasan informasi upah minimum provinsi	7.417.000,-
7	meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.	Jamsostek		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	norma kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	
		Jumlah perusahaan yang melaksanakan pelaporan ketenagakerjaan	12		Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	22.000.000,-
					Penyebarluasan informasi norma kerja	4.561.500,-
					Penyebarluasan informasi upah minimum provinsi	8.117.000,-
		Persentase Koperasi Aktif;	90,19		Pembinaan perkoperasian	59.190.000
					Pembinaan manajemen administrasi usaha koperasi dan usaha kecil	30.090.000
		Persentase Koperasi Sehat	78,94		Pemantapan kinerja koperasi penerima dana program	9.030.000
8	Meningkatnya SDM Usaha Kecil yang berkualitas.	Persentase SDM Usaha Kecil yang berkualitas;	27,55		Peningkatan permodalan dan pembiayaan koperasi dan UKM	38.840.000
9	Meningkatnya SDM koperasi yang berkualitas.	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas;	29,91		Pembinaan bagi gerakan koperasi dan usaha kecil	204.540.000
10	Meningkatnya pembinaan 5.000 wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru UMKM	-		Peningkatan gerakan kualitas kelembagaan koperasi	65.240.000
		Jumlah Lapangan pekerjaan baru	3		-	-
11	meningkatnya pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil	persentase SDM dan / atau Calon SDM industri yang mendapatkan pembinaan	3,30	Program pengembangan industri kecil dan menengah	penguatan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	71.892.000

					Pembinaan industry kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	28.525.500
12	Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	10		Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	152.677.250
13	meningkatnya promosi produk Industri Kecil	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang produknya dipromosikan	5		promosi dan pengembangan produk industri kecil dan menengah	957.252.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan tahapan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2018 disusun dengan mengukur capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja ini. Metode pengukuran yang dilaksanakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (*performance improvement*). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi telah mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur keberhasilan kinerja sasaran, indikator yang dipakai dapat berupa indikator absolut di mana indikator tersebut melekat pada masing-masing kegiatan yaitu : indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome*, atau merupakan dampak makro (*outcomes, benefit, impact*) dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja *outcome* yang dihasilkan dengan rencana pada masing-masing kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja indikator sasaran.

Indikator kinerja *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan dan pemakaian SDM. Indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan. Sedangkan indikator kinerja *outcome* berupa manfaat yang diperoleh dari berfungsinya output yang dapat di ukur dalam jangka pendek.

1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) cenderung lebih di titik beratkan sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian IKU pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kab. Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian IKU Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	CAPAIAN %
1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,10	3,35	93,65
2	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	41,61	38,42	100
3	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,62	62,60	95,39
4	Persentase Koperasi Aktif	%	90,91	90,19	99,20
5	Persentase Koperasi Sehat	%	78,94	78,94	100
6	Jumlah wirausaha baru	UMKM	45.096	47.353	105
7	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	IKM	10	10	100

1.2 Pengukuran

Tabel 3.2

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan Indikator
1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penganggur Dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja x 100%
2	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dibanding Dengan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar x 100%
3	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah penduduk angkatan kerja dibanding jumlah penduduk usia kerja x 100%
4	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah koperasi x 100%
5	Persentase Koperasi Sehat	jumlah koperasi sehat dibagi dengan jumlah koperasi x 100%
6	Jumlah wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru
7	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu

1.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir tahapan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Triwulan I Tahun 2018, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) **SASARAN STRATEGIS 1** Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.3

$$\frac{4.239}{117.115} \times 100$$

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,15	3,35	93,65	Belum Tercapai
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid lightblue; padding: 5px; display: inline-block;"> $\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$ </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> $\frac{3889}{115.985} \times 100$ </div> </div>						

Pencapaian sasaran strategis 1 yaitu Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dilihat dari indikator kinerja sasaran persentase Tingkat Pengangguran Terbuka.

Jumlah pengangguran pada triwulan ketiga sebanyak 3.889 orang yang terdiri dari pengangguran usia kerja dan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah pengangguran berdasarkan data bidang tenaga kerja ini diperoleh sampai dengan maret 2018.

Realisasi capaian kinerja pada TW I yaitu 93,65 %, sedangkan targetnya 3,15%, sehingga target belum tercapai dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan terkait dengan jadwal pelaksanaan di Triwulan I tahun 2018.

Pencapaian sasaran strategis 1 didukung oleh program dan kegiatan pada **Bidang Tenaga Kerja** dan dukungan dari Bidang lain yaitu :

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis 1

No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja			
	- Pendayagunaan tenaga kerja berbasis padat karya	Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam padat karya	160 org	0
	- Pelatihan keterampilan menjahit	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	32	0
	- Pelatihan keterampilan service sepeda motor	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	96 org	0

Program lain yang mendukung untuk pencapaian penurunan tingkat pengangguran adalah instansi lain terutama dinas perikanan dan pembukaan lahan pertanian yang terkait langsung dengan program penciptaan lapangan kerja, juga program2 perusahaan swasta dalam penerimaan tenaga kerja baru.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Dukungan sumber daya manusia yang potensial dan kompeten;
- Terjalannya kerjasama ketenagakerjaan antara instansi pemerintah dan pihak swasta ;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai;

- Adanya motivasi dan keinginan masyarakat penerima dana program/kegiatan baik pemerintah atau swasta untuk menjadi wirausaha baru.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Proses seleksi penerimaan pegawai pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang memerlukan spesifikasi pendidikan dan keahlian tertentu yang masih sulit untuk di penuhi;
- Ketidak siapan tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja yang ada masih jauh dari yang di persyaratkan oleh perusahaan.
- Terbatasnya perusahaan swasta yang berinvestasi di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral baik antar instansi pemerintah ataupun dengan perusahaan swasta;
- Melaksanakan program kegiatan yang bersifat peningkatan kompetensi yang bersinergi dengan program pemerintah maupun swasta sesuai dengan kebutuhan kualifikasi tertentu.
- Membuka peluang investasi seluas luasnya bagi perusahaan swasta di berbagai bidang usaha.
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
	Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam padat karya	- Pendayagunaan tenaga kerja berbasis padat karya	85.231.000	0
	Jumlah peserta yang mengikuti	Pelatihan keterampilan	255.440.000	0

	pelatihan	menjahit		
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Pelatihan keterampilan service sepeda motor	290.825.500	0
J U M L A H			631.496.500	0

1.) **SASARAN STRATEGIS 2** Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

81,27 **Tabel 3.6**

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW III	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	38,42	38,42	100	Tercapai
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> $\frac{\text{Jumlah Penempatan Tenaga Kerja}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Terdaftar}} \times 100 \rightarrow \frac{709}{1.845} \times 100$ </div>						

Pencapaian sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada **Bidang Tenaga Kerja**, yaitu :

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis 2

No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja			
	Pelatihan service sepeda motor	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	96 Orang	0

Deskripsi Kegiatan :

Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan penyebarluasan pasar kerja merupakan bentuk kerjasama dengan perusahaan perusahaan swasta maupun pemerintah. Kegiatan ini merupakan pembinaan kepada para pencari kerja (AK1) dengan narasumber dari tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya yang akan

di arahkan pada bengkel resmi atau non resmi di kabupaten HSS. Pada Triwulan I belum ada realisasi.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

Ketersediaan Potensi dan Sumber daya tenaga kerja yang kompeten dalam upaya mendukung penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan yang di harapkan.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Masih ada beberapa tenaga kerja yang belum kompeten di bidangnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Perlu terus melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan/kompetensi terkait bidang kerja serta peningkatan kompetensi yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang di tekuni.
- Melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi bagi pencari kerja pemula.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja		Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Pelatihan service sepeda motor	290.825.500	0
J U M L A H			290.825.500	0

2.) **SASARAN STRATEGIS 3** Meningkatkan partisipasi angkatan kerja

Tabel 3.9

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,62	62,63	95,42	Belum Tercapai

$$\frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100 \quad \rightarrow \quad \frac{115.985}{185.189} \times 100$$

Pencapaian sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya partisipasi angkatan kerja diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada **Bidang Tenaga Kerja**, yaitu :

Tabel 3.10

Target dan Realisasi Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis 3

No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja			
	-	-	-	0

Deskripsi Kegiatan :

- Sasaran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja ini merupakan non kegiatan dengan metode hasil data perolehan dari data kependudukan dan badan pusat statistic. Pendataan ini juga berfungsi untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi angkatan kerja masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap tantangan lapangan kerja yang tersedia (responsibilitas).

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Ketersediaan data dari instansi terkait merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka panjang.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Validitas data yang perlu koreksi untuk menentukan langkah strategis kebijakan pimpinan daerah.
- Jangka waktu antara permintaan data dan penerimaan data yang makan waktu lama;
- Ketergantungan terhadap data manual sangat tinggi;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar yang terkait dengan data ketenagakerjaan.
- Sarana prasarana serta tenaga operasional data yang terbatas.

- Tidak adanya anggaran untuk pencapaian target.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Melaksanakan aksesibilitas data yang terkoneksi secara online dalam satu wadah sebagai tempat pusat data dan informasi (pusdatin) ketenagakerjaan.
- Melaksanakan intervensi program dan kegiatan untuk mendukung kegiatan ini.

4). SASARAN STRATEGIS 4 meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.

Tabel 3.11

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase Koperasi Aktif	%	90,91	90,91	99,20	Belum Tercapai

Pencapaian sasaran strategis 4 yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada **Bidang Koperasi Usaha Kecil**, yaitu :

Tabel 3.13

Target dan Realisasi Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis 4

No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			
	Pembinaan perkoperasian	Jumlah koperasi aktif yang di bina	19 Koperasi	0
	Pembinaan manajemen administrasi usaha koperasi dan usaha kecil	Jumlah koperasi aktif yang di bina	70 Koperasi	0

Deskripsi Kegiatan :

- a. Pembinaan koperasi aktif, dalam kegiatan ini akan dilaksanakan penyuluhan koperasi sebanyak 19 koperasi dengan peserta sebanyak 38 orang. Disamping itu terdapat fasilitasi RAT Koperasi aktif. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini belum dilaksanakan.
- b. Pembinaan manajemen administrasi usaha koperasi dan usaha kecil, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan diklat tentang administrasi pembukuan bagi bendahara, pengelola dan jasa pendampingan bagi 70 koperasi aktif.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Sikap asertif para anggota koperasi untuk memenuhi kewajiban sebagai bagian dari usaha kelompok;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Prosedur pembubaran koperasi masih terkendala pada karakteristik fungsionaris yang cenderung tidak mematuhi aturan.
- Pembuktian yang menjadi bukti dasar legalitas formal sulit dilakukan.
- Ketidak fahaman anggota koperasi tentang prosedur pembubaran koperasi masih rendah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melaksanakan koordinasi dengan koperasi terkait untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan;
- Melakukan pengawasan secara intensif kepada koperasi yang bersangkutan untuk menemukan bukti ketidak sehatan koperasi;
- Melaksanakan koordinasi lintas sectoral dengan pihak berwajib apabila diperlukan;

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	Jumlah koperasi aktif	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		
		Pembinaan	59.190.000	0

		perkoperasian		
		Pembinaan manajemen administrasi usaha koperasi dan usaha kecil	30.090.000	0
J U M L A H			89.280.000	0

- 3.) **SASARAN STRATEGIS 5** meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.

Tabel 3.15

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW III	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase koperasi sehat	%	81,69	78,43	96,01	Belum Tercapai

Pencapaian sasaran strategis 4 yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada **Bidang Koperasi Usaha Kecil**, yaitu :

Tabel 3.16

Target dan Realisasi Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis 5

No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			
	Pemantapan kinerja koperasi penerima dana program	Jumlah laporan koperasi aktif penerima dana program	60	0
	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif yang di tingkatkan kualitasnya	150	0
	Pembinaan bagi gerakan koperasi dan usaha kecil	Jumlah koperasi sehat yang di bina	150	0
	Peningkatan permodalan dan pembiayaan koperasi dan UKM	Jumlah koperasi sehat yang di fasilitasi permodalan	50	0

Deskripsi Kegiatan :

- a. Penghargaan koperasi berprestasi, dalam kegiatan ini akan diberikan piagam penghargaan terhadap koperasi yang berprestasi berupa belanja modal software System IT KSP-USP (1 paket terdiri dari software Armadillo dan SMS Instant) terhadap 10 koperasi. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini telah dilaksanakan.
- b. Peningkatan kualitas administrasi pembukuan koperasi berbasis IT, dilaksanakan diklat sistem IT untuk 25 koperasi. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini telah dilaksanakan.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Sikap asertif para anggota koperasi untuk memenuhi kewajiban sebagai bagian dari usaha kelompok;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Sumber daya manusia anggota koperasi yang tidak siap menerima perkembangan manajemen keuangan berbasis informasi dan teknologi.
- Dukungan perangkat kerja berbasis IT yang dimiliki koperasi kurang memadai.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melaksanakan koordinasi dengan koperasi terkait untuk melakukan pembelajaran IT melalui pendampingan secara kontinyu;
- Meningkatkan program program dan kegiatan assistensi berkala secara intensif kepada koperasi yang telah mendapatkan instalasi berbasis IT.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 5 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17**Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4**

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	Jumlah koperasi sehat	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		
		Pemantapan kinerja koperasi penerima dana program	9.030.000	0
		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	65.240.000	0
		Pembinaan bagi gerakan koperasi dan usaha kecil	204.540.000	0
		Peningkatan permodalan dan pembiayaan koperasi dan UKM	38.840.000	0
J U M L A H			317.650.000	0

- 4.) **SASARAN STAREGIS 6** Meningkatnya pembinaan untuk 5000 usaha kecil produktif

Tabel 3.18**Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW III	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Jumlah wirausaha baru	UMKM	45.096	47.353	105	Tercapai

Pencapaian sasaran strategis 6 yaitu Meningkatnya pembinaan untuk 5000 usaha kecil produktif diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada **Bidang Koperasi Usaha Kecil**, yaitu :

Tabel 3.19**Target dan Realisasi Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis 6**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
-	-	Jumlah wirausaha baru	45.096	47.353

Deskripsi Kegiatan :

- a. Kegiatan ini merupakan target RPJMD dan telah tercapai dengan persentase 105 % di Triwulan I Tahun 2017.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam menciptakan capaian wirausaha baru melibatkan instansi lain yang terkait serta pihak perbankan sebagai lembaga keuangan dengan program bantuan permodalan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 6 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20**Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 6**

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya pembinaan untuk 5000 usaha kecil produktif	-	-	-	-
J U M L A H			-	-

- 5.) **SASARAN STRATEGIS 7** Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu

Tabel 3.21

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW III	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	IKM	10	0	0	Belum Tercapai

Pencapaian sasaran strategis 7 yaitu Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada **Bidang Perindustrian**, yaitu :

Tabel 3.22

Target dan Realisasi Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis 7

No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah			
	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Jumlah sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah	40 ikm	40 ikm

Deskripsi Kegiatan :

- a. Program pengembangan industri kecil dan menengah (**Seksi sandang dan pangan**), dalam kegiatan ini akan dilaksanakan cara sertifikasi dan cara berproduksi yang baik bagi IKM pangan serta tata cara penomoran sertifikat P-IRT yang di ikuti oleh 160 Orang untuk dua pelatihan. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini, belum ada pelaksanaan kegiatan.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Kebersediaan pelaku Industri pangan untuk mengikuti pelatihan kemudahan izin dan tatacara penomoran P-IRT
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Masih adanya keraguan dari pelaku usaha yang berkaitan dengan kemudahan izin dan biaya pengurusan usaha kecil.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha kecil terutama bidang pangan dalam pengurusan izin sertifikasi;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara pemerintah dan dunia industry tentang kemudahan izin dan sertifikasi produk

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 7 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 7

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu		Program pengembangan industri kecil dan menengah		
	Jumlah sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	37.962.000	17.653.000
J U M L A H			37.962.000	17.653.000

1.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33

**Alokasi dan Realisasi pada Sekretariat
Triwulan I Tahun 2018**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	IKM	80	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3,900,000	0	0
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	65,550,000	3.084.412	4,70
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11,500,000	0	0
						Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	11,000,000	0	0
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11,500,000	0	0
						Penyediaan alat tulis kantor	23,550,000	0	0
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,660,000	0	0
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,579,400	0	0

					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	48,208,500	0	0
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,800,000	85.000	1.77
					Penyediaan makanan dan minuman	13,490,000	570.000	4.22
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	223,315,000	0	0
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	45,550,000	0	0
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	32,350,000	0	0
	Persentase keluhan pengaduan layanan yang di tindaklanjuti	%	100	Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55,000,000	0	0
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66,270,000	995.000	1.50
	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	B	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			
	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang di tindaklanjuti	%	100			8,950,000	0	0

Tabel 3.34**Alokasi dan Realisasi pada Bidang Tenaga Kerja
Triwulan I Tahun 2018**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,10	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pendayagunaan tenaga kerja berbasis padat karya	49,820,000	0	0
3	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	%	42,76		Pelatihan keterampilan service sepeda motor	290,825,500	0	0
		Jumlah calon wirausaha baru	wirausaha baru	25		Pelatihan keterampilan menjahit	255,440,000	0	0
4	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	38,42		Pembinaan kompetensi pada pencari kerja pemula	49,820,000	0	0
5	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	persentase tingkat partisipasi angkatan kerja		65,62					
		Jumlah lowongan pekerjaan baru		Lowongan kerja baru	3				
6	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	%	0,20	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	23,623,000	8,258,000	0.35
		persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	0,33		Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	36,136,800	11,875,200	0.33

		persentase Pekerja/Buruh Yang terdaftar Jamsostek	%	0,42		Penyebarluasan informasi norma kerja	6,161,500	0	0.00
		Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	Persh	15		Penyebarluasan informasi upah minimum provinsi	8,117,000	0	0.00
		Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapo Ketenagakerjaan		15		Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	22,000,000	11,000,000	0.50

Tabel 3.35**Alokasi dan Realisasi pada Bidang Koperasi Usaha Kecil
Triwulan I Tahun 2018**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.	Persentase Koperasi Aktif;	%	90,91	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Pembubaran/peleburan dan penertiban koperasi tidak aktif	8,867,500	3,240,000	0.37
	meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.	Persentase Koperasi Aktif;		90,91		Peningkatan jumlah koperasi aktif	102,662,500	15,142,500	0.15
		Persentase Koperasi Sehat		78,94		Penghargaan koperasi berprestasi	129,259,500	127,865,000	0.99
8	Meningkatnya SDM Usaha Kecil yang berkualitas.	Persentase SDM Usaha Kecil yang berkualitas;	%	27,55		Peningkatan kualitas administrasi pembukuan koperasi berbasis IT	23,117,500	19,200,000	0.83
9	Meningkatnya SDM koperasi yang berkualitas.	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas;		29,91		Peningkatan kualitas koperasi melalui diklat perkoperasian	61,210,000	33,510,000	0.55
10	Meningkatnya pembinaan 5.000 wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru UMKM		UMKM		-	Pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro	197,598,000	18,100,600
		Jumlah Lapangan pekerjaan baru		3					

Tabel 3.36**Alokasi dan Realisasi pada Bidang Perindustrian
Triwulan I Tahun 2018**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	meningkatnya pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil	persentase SDM dan / atau Calon SDM industri yang mendapatkan pembinaan	%	3,30	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya	458,310,750	117,604,000	0.26
12	Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu	IKM	10		Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	37,962,000	17,653,000	0.47
13	meningkatnya promosi produk Industri Kecil	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang produknya dipromosikan		4		Fasilitasi promosi dan pengembangan produk industri kecil dan menengah	1,002,991,000	415,009,229	0.41